

Strategi Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam Menguatkan Ketahanan Ekonomi Umat melalui UMKM Syariah

Lailatul Fitri¹ Lailatul Fitria² Alfiannisa Septisa Tadzki³

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
lailatulfitri281103@gmail.com lailatulfitriac@gmail.com alfnisaspt30@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Bakesbangpol, ketahanan ekonomi, ekonomi umat, UMKM syariah, Jember.

Article history:

Received 05-08-2026

Revised 10-08-2026

Accepted 12-08-2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember dalam menguatkan ketahanan ekonomi umat melalui pengembangan ekosistem UMKM syariah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis dampaknya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan unsur Bakesbangpol, pelaku UMKM, serta pihak terkait. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi Bakesbangpol lebih tepat dipahami sebagai strategi kelembagaan dan koordinatif dalam memperkuat ketahanan ekonomi, terutama melalui perumusan kebijakan, fasilitasi sinergi antarlembaga, penguatan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat, serta penciptaan kondisi sosial yang kondusif bagi aktivitas ekonomi. Pengembangan UMKM syariah memerlukan keterhubungan dengan Diskopumdag, lembaga keuangan syariah, BAZNAS, Kementerian Agama, organisasi keagamaan, pesantren, dan komunitas usaha. Strategi tersebut berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi umat apabila diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, legalitas dan sertifikasi halal, akses pembiayaan, pemasaran, serta penguatan jejaring usaha.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Lailatul Fitri: lailatulfitri281103@gmail.com

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PENDAHULUAN

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, stabil, dan mampu menghadapi berbagai perubahan sosial maupun ekonomi. Ketahanan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mempertahankan sumber penghidupan, mengembangkan usaha produktif, memperoleh akses pembiayaan, dan membangun jejaring ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks daerah, penguatan ketahanan ekonomi membutuhkan keterlibatan berbagai aktor pemerintahan, dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat. (Rifki, M., Rahmawati, A. O., & Malik, 2025)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam proses tersebut karena menjadi salah satu basis kegiatan ekonomi masyarakat. UMKM tidak hanya berperan sebagai unit produksi dan perdagangan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan. Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan UMKM memiliki dimensi yang lebih luas karena kegiatan usaha diarahkan agar tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan produk, keadilan transaksi, kebermanfaatn sosial, serta penggunaan sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Indonesia menempatkan pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi pesantren, dan pengembangan rantai pasok halal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah. (Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, 2024).

Kabupaten Jember memiliki peluang yang besar dalam pengembangan ekonomi umat. Pemerintah Kabupaten Jember dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perhatian terhadap pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan UMKM halal. Pemerintah daerah juga mendorong legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai bagian dari peningkatan daya saing UMKM. Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa legalitas usaha dan sertifikasi halal menjadi fondasi penting untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa dan UMKM. Diskopumdag Kabupaten Jember juga menyampaikan komitmen untuk mendorong UMKM memenuhi kewajiban sertifikasi halal serta memberikan fasilitasi terhadap pengembangan usaha. (Hasanah, S. A., & Suhma, 2026)

Dalam konteks kelembagaan pemerintahan, Bakesbangpol memiliki posisi yang menarik untuk dikaji. Secara kelembagaan, Bakesbangpol merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2025 menempatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Namun, tugas Bakesbangpol tidak dapat dipisahkan dari agenda pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Dokumen perencanaan Bakesbangpol Kabupaten Jember menunjukkan adanya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang tersebut. (Drajat, M. K. D., Muhibuddin, A. M., & Bahri, 2026).

Keterkaitan tersebut menjadi semakin relevan karena ketahanan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dalam arti sempit, tetapi juga berhubungan dengan stabilitas sosial, hubungan antarkelompok, dan kondusivitas daerah. Pemerintah Kabupaten Jember pada 2026 juga menempatkan data ekonomi sebagai instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menjaga stabilitas serta kondusivitas

daerah. Dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2026, Bakesbangpol Jember turut terlibat dalam mendukung agenda tersebut.

Di sisi lain, pengembangan UMKM syariah membutuhkan ekosistem yang tidak dapat dibangun oleh satu lembaga saja. Pelaku usaha membutuhkan peningkatan kapasitas, legalitas, sertifikasi halal, akses pembiayaan, pemasaran, digitalisasi, dan jejaring usaha. KNEKS bahkan mengembangkan pedoman business matching pembiayaan syariah bagi UMKM yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, asosiasi, inkubator bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM syariah idealnya dibangun melalui kolaborasi lintas lembaga.

Penelitian mengenai UMKM syariah sebelumnya banyak menyoroti aspek pembiayaan, pemberdayaan masyarakat, sertifikasi halal, dan pengembangan kapasitas usaha. Penelitian Al Azroh dan Mugiyati menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dapat memberikan dukungan tidak hanya melalui modal, tetapi juga melalui pendampingan manajerial dan penguatan jaringan usaha. Sementara itu, penelitian mengenai pemberdayaan UMKM juga menunjukkan pentingnya pendataan, pelatihan manajemen keuangan, legalitas usaha, label halal, inovasi produk, dan pemasaran.

Meskipun demikian, kajian mengenai peran Bakesbangpol dalam penguatan ketahanan ekonomi umat melalui ekosistem UMKM syariah masih relatif terbatas. Bakesbangpol selama ini lebih sering dipahami melalui fungsi kesatuan bangsa, politik, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik sosial. Padahal, dokumen perencanaan menunjukkan bahwa aspek ketahanan ekonomi juga menjadi bagian dari ruang kebijakan lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melihat bagaimana fungsi kelembagaan Bakesbangpol dapat ditempatkan dalam kerangka penguatan ketahanan ekonomi umat melalui pengembangan ekosistem UMKM syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam menguatkan ketahanan ekonomi umat melalui UMKM syariah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi tersebut, serta menganalisis kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah berbasis kelembagaan pemerintah daerah sekaligus memberikan masukan praktis mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai strategi kelembagaan Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam menguatkan ketahanan ekonomi umat melalui pengembangan UMKM syariah. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk memahami proses, kebijakan, bentuk koordinasi, faktor pendukung, hambatan, dan kontribusi strategi yang dilakukan oleh lembaga. (Tanjung, E. R., & Albina, 2025)

Lokasi penelitian direncanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember serta pada beberapa UMKM yang memiliki karakteristik usaha berbasis prinsip syariah atau sedang mengembangkan legalitas dan ekosistem halal. Informan penelitian terdiri atas unsur pimpinan atau pejabat yang menangani bidang ketahanan ekonomi di Bakesbangpol, pelaku UMKM, serta pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan

ekonomi umat, seperti unsur pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat, pesantren, atau lembaga zakat sesuai dengan keterlibatan mereka dalam program yang diteliti.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai kebijakan, strategi, pola koordinasi, bentuk fasilitasi, kendala, dan dampak program terhadap pelaku UMKM. Observasi dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penguatan ketahanan ekonomi dan aktivitas UMKM. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen kebijakan, program kerja, laporan kegiatan, data UMKM, dan dokumen kerja sama antarlembaga.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen resmi. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai posisi dan strategi Bakesbangpol dalam penguatan ketahanan ekonomi umat. (Adji, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kelembagaan Bakesbangpol dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahwa posisi Bakesbangpol dalam penguatan ketahanan ekonomi perlu dipahami melalui fungsi kelembagaan dan koordinatif. Bakesbangpol bukan lembaga teknis yang secara khusus bertugas melakukan pembinaan UMKM sebagaimana perangkat daerah yang menangani koperasi dan UMKM. Namun, Bakesbangpol memiliki ruang strategis melalui kebijakan dan program ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Dokumen perencanaan Bakesbangpol Kabupaten Jember secara eksplisit mencantumkan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. (Putra, 2025)

Posisi tersebut menjadikan strategi Bakesbangpol lebih tepat diarahkan pada penguatan ekosistem daripada mengambil alih fungsi teknis perangkat daerah lain. Dalam konteks UMKM syariah, penguatan ekosistem dapat dilakukan melalui pemetaan kebutuhan ekonomi masyarakat, fasilitasi komunikasi antarorganisasi, koordinasi dengan perangkat daerah, serta penciptaan kondisi sosial yang mendukung aktivitas ekonomi. Dengan demikian, ketahanan ekonomi dipahami sebagai bagian dari ketahanan masyarakat secara keseluruhan.

Strategi ini sejalan dengan perkembangan kebijakan ekonomi syariah yang menempatkan sinergi antarpemangku kepentingan sebagai salah satu faktor penting. Bank Indonesia menekankan pengembangan rantai nilai halal, penguatan UMKM, ekonomi pesantren, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi syariah. Dalam konteks daerah, strategi tersebut membutuhkan keterhubungan antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, organisasi keagamaan, pesantren, dan lembaga sosial.

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas UMKM Syariah

Pembinaan menjadi salah satu komponen penting dalam penguatan ketahanan ekonomi umat. UMKM yang ingin berkembang dalam ekosistem syariah tidak cukup hanya

memiliki produk yang laku di pasar, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, memahami prinsip transaksi syariah, memenuhi legalitas usaha, menjaga kualitas produk, dan mengembangkan pemasaran.

Dalam konteks Kabupaten Jember, aspek legalitas dan sertifikasi halal menjadi semakin penting. Pemerintah Kabupaten Jember pada 2026 menempatkan legalitas usaha berupa NIB dan persiapan sertifikasi halal sebagai fondasi peningkatan daya saing UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM syariah tidak dapat dilepaskan dari aspek formalitas usaha dan jaminan produk halal.

Bakesbangpol dapat mengambil peran pada aspek koordinasi dengan menghubungkan kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, komunitas keagamaan, dan pelaku UMKM dengan perangkat daerah atau lembaga yang memiliki kewenangan teknis. Pola tersebut lebih sesuai dengan karakter kelembagaan Bakesbangpol karena lembaga ini memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi dengan organisasi masyarakat dan berbagai unsur sosial.

Dengan demikian, pembinaan UMKM syariah dapat dikembangkan melalui pola link and match. Bakesbangpol berperan membuka ruang koordinasi dan pemetaan kebutuhan, sementara pelaksanaan pelatihan teknis dapat melibatkan Diskopumdag, Kementerian Agama, lembaga keuangan syariah, BAZNAS, Bank Indonesia, perguruan tinggi, pesantren, dan organisasi masyarakat sesuai kompetensinya.

Fasilitasi Akses Pembiayaan Syariah

Permodalan merupakan salah satu persoalan penting dalam pengembangan UMKM. Akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi semakin relevan bagi pelaku usaha yang ingin menjaga kesesuaian antara aktivitas bisnis dan nilai-nilai Islam. Pembiayaan syariah dapat menggunakan berbagai akad sesuai kebutuhan dan karakter usaha. Selain modal, lembaga pembiayaan syariah juga dapat memberikan pendampingan manajerial dan membuka jaringan usaha.

Dalam konteks ini, Bakesbangpol tidak perlu ditempatkan sebagai pemberi modal. Peran yang lebih realistis adalah sebagai fasilitator hubungan antara kelompok UMKM dan lembaga yang memiliki kewenangan pembiayaan. Bakesbangpol dapat membantu menciptakan forum koordinasi yang mempertemukan pelaku UMKM dengan BMT, koperasi syariah, perbankan syariah, lembaga zakat, dan lembaga pendanaan lainnya. (Muttaqim, H., & Dev, 2025)

KNEKS juga menekankan pentingnya business matching pembiayaan syariah yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, asosiasi, inkubator bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Model tersebut relevan untuk dikembangkan di Kabupaten Jember karena dapat mempertemukan kebutuhan modal UMKM dengan lembaga pembiayaan yang sesuai.

Penguatan Sinergi dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan

Penguatan ekonomi umat memiliki dimensi sosial yang kuat. Organisasi masyarakat, pesantren, komunitas keagamaan, dan lembaga zakat dapat menjadi bagian penting dalam membangun jaringan usaha masyarakat. Karena Bakesbangpol memiliki ruang koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan, posisi tersebut dapat dikembangkan sebagai jembatan dalam memperkuat jejaring ekonomi umat.

Sinergi tersebut dapat diarahkan pada pengembangan UMKM berbasis komunitas, penguatan usaha pesantren, pemasaran produk halal, kegiatan pameran, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan jaringan pemasaran. Bank Indonesia juga menempatkan penguatan ekonomi pesantren dan UMKM sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi syariah.

Dalam perspektif pemberdayaan ekonomi umat, keberadaan lembaga sosial keagamaan juga penting. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara produktif dapat diarahkan untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi umat menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dapat menjadi instrumen untuk membangun kemandirian ekonomi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Ketahanan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari stabilitas sosial. Pelaku UMKM membutuhkan lingkungan usaha yang aman, tertib, dan kondusif. Konflik sosial, ketidakpastian, dan lemahnya komunikasi antarkelompok dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks inilah fungsi Bakesbangpol menjadi penting.

Program Bakesbangpol Kabupaten Jember tidak hanya mencakup ketahanan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Dokumen evaluasi kinerja daerah menunjukkan adanya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Oleh sebab itu, penciptaan kondisi sosial yang kondusif dapat dilihat sebagai kontribusi tidak langsung terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi umat tidak cukup dibangun melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha. Ketahanan juga membutuhkan lingkungan sosial yang memungkinkan kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan berjalan secara aman. Bakesbangpol dapat berkontribusi melalui pemetaan potensi konflik, komunikasi sosial, penguatan toleransi, serta koordinasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Penguatan ketahanan ekonomi umat melalui UMKM syariah memiliki sejumlah faktor pendukung. Pertama, adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan UMKM dan sertifikasi halal. Kedua, berkembangnya ekosistem ekonomi syariah yang melibatkan lembaga keuangan, pemerintah, pesantren, organisasi keagamaan, dan komunitas usaha. Ketiga, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk halal. Keempat, adanya peluang pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan transaksi usaha. (Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, 2024).

Pemerintah Kabupaten Jember pada 2026 menunjukkan perhatian terhadap legalitas usaha, sertifikasi halal, dan peningkatan daya saing UMKM. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah nasional menunjukkan semakin kuatnya perhatian terhadap UMKM halal, pembiayaan syariah, dan penguatan ekosistem halal.

Sementara itu, faktor penghambat dapat berasal dari keterbatasan literasi ekonomi syariah, kemampuan manajemen UMKM yang belum merata, keterbatasan akses pembiayaan, belum optimalnya sertifikasi halal, lemahnya pencatatan keuangan, dan keterbatasan pemasaran. Hambatan lain yang perlu diperhatikan adalah fragmentasi

program antarlembaga. Apabila pembinaan UMKM dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa basis data dan koordinasi yang jelas, maka program dapat berjalan tetapi dampaknya terhadap ketahanan ekonomi masyarakat menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, strategi Bakesbangpol perlu diarahkan pada penguatan koordinasi dan integrasi. Bakesbangpol dapat membantu memastikan bahwa kelompok masyarakat dan pelaku UMKM memperoleh akses terhadap lembaga yang tepat sesuai kebutuhannya. Pola ini memungkinkan pembinaan UMKM syariah menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar program pelatihan yang berdiri sendiri.

Dampak terhadap Kemandirian Ekonomi Umat

Kemandirian ekonomi dapat dilihat melalui kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, mengakses pembiayaan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan. Dalam konteks UMKM syariah, kemandirian juga mencakup kemampuan menjalankan usaha berdasarkan prinsip halal, transparansi transaksi, dan tanggung jawab sosial.

Strategi kelembagaan Bakesbangpol dapat memberikan dampak tidak langsung tetapi strategis terhadap kemandirian tersebut. Ketika koordinasi antarlembaga semakin kuat, pelaku UMKM memperoleh peluang lebih besar untuk mendapatkan pelatihan, legalitas, sertifikasi halal, pembiayaan, dan akses pasar. Dengan demikian, kontribusi Bakesbangpol bukan terutama pada peningkatan omzet secara langsung, tetapi pada penciptaan lingkungan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan usaha. (Juriati, L., Mahmud, 2026)

Temuan konseptual ini memperkuat pandangan bahwa pemberdayaan UMKM syariah harus dilakukan melalui pendekatan ekosistem. Penguatan usaha mikro tidak hanya memerlukan modal, tetapi juga pendampingan, jaringan, kepastian legalitas, akses pasar, dan kapasitas manajerial. Dalam konteks Jember, pendekatan tersebut dapat dikembangkan dengan memperkuat hubungan antara Bakesbangpol sebagai fasilitator kelembagaan dengan perangkat daerah teknis dan lembaga ekonomi syariah.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya melihat Bakesbangpol bukan hanya sebagai lembaga yang berhubungan dengan politik, wawasan kebangsaan, dan stabilitas sosial, tetapi juga sebagai salah satu aktor kelembagaan yang dapat berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi melalui fungsi koordinasi dan penguatan ekosistem UMKM syariah. Posisi ini tidak berarti menggeser kewenangan perangkat daerah teknis, melainkan memperluas perspektif bahwa ketahanan ekonomi merupakan bagian dari ketahanan masyarakat yang membutuhkan sinergi lintas sektor.

KESIMPULAN

Strategi Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam menguatkan ketahanan ekonomi umat melalui UMKM syariah lebih tepat ditempatkan pada fungsi kebijakan, koordinasi, fasilitasi, dan penciptaan kondisi sosial yang kondusif daripada sebagai pelaksana teknis pembinaan UMKM. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui sinergi dengan Diskopumdag, lembaga keuangan syariah, BAZNAS, Kementerian Agama, pesantren, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, legalitas dan sertifikasi halal, akses pembiayaan, pemasaran, serta jejaring usaha. Faktor pendukung utama berupa perhatian pemerintah terhadap UMKM dan ekonomi syariah, sedangkan hambatannya mencakup keterbatasan literasi, modal, legalitas, manajemen, dan koordinasi antarlembaga. Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, Bakesbangpol berpotensi

memberikan kontribusi strategis terhadap terciptanya ekosistem ekonomi yang stabil, inklusif, dan mendukung kemandirian ekonomi umat. Penelitian selanjutnya perlu menguji strategi tersebut melalui data lapangan dari Bakesbangpol dan pelaku UMKM untuk mengukur dampak nyata terhadap pendapatan, keberlanjutan usaha, akses pembiayaan, dan kemandirian ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, T. P. (2024). Desain penelitian kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 27, A27.
- Drajat, M. K. D., Muhibuddin, A. M., & Bahri, S. (2026). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan. *Paradigma Journal of Administration*, 4(1), 71-76.
- Hasanah, S. A., & Suhma, W. K. (2026). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Jember: Studi Kasus Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 612-618..
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., Saftri, D., ... & Asmanto, E. (2024). *Perkembangan industri halal & penguatan lembaga keuangan syariah*. Penerbit Adab.
- Juriati, L., Mahmud, M., Maruwae, A., Hafid, R., & Halid, R. M. (2026). Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Keluarga Desa. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 4(1), 367-381.
- Muttaqim, H., & Dev, M. E. (2025). *KOPERASI DAN UMKM: Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Putra, R. (2025). Manajemen Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok 2025–2030. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(8), 560-565.
- Rifki, M., Rahmawati, A. O., & Malik, A. (2025). Strategi adaptasi keluarga miskin dalam mempertahankan ketahanan pangan di tengah ketidakstabilan ekonomi nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Tanjung, E. R., & Albina, M. (2025). Penelitian deskriptif dalam pendidikan. *BLAZE: Jurnal Bahasa Dan Sastra Dalam Pendidikan Linguistik Dan Pengembangan*, 3(3), 168-176.
- Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & Al-Qorni, Z. Q. (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 265-282.